**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
DISKUSI PUBLIK ‘*OPEN GOVERNMENT* DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA’
DALAM RANGKA PEKAN *OPEN GOVERNMENT* 27 – 31 MEI 2024**

1. **Latar Belakang**

Tata kelola yang baik membutuhkan partisipasi aktif masyarakat sipil dalam pembuatan kebijakan dan pengawasan. Pendekatan kolaboratif ini diwujudkan dalam konsep "pemerintahan terbuka" yang mengedepankan transparansi, partisipasi, akuntabilitas, inklusivitas, dan inovasi. Indonesia, sebagai negara yang tergabung dalam *Open Government Partnership (OGP)*, berkomitmen kuat untuk menerapkan prinsip-prinsip ini. Komitmen tersebut telah diwujudkan melalui pengembangan dan pelaksanaan tujuh Rencana Aksi Nasional (RAN) Keterbukaan Pemerintah sejak 2011. RAN ini menangani isu-isu strategis seperti anti-korupsi dan penganggaran, ruang sipil dan demokrasi, layanan publik yang inklusif, akses terhadap keadilan, kesetaraan gender, hak disabilitas, inklusi sosial, serta energi, lingkungan hidup, dan sumber daya alam.

Banyak Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) telah terlibat dalam proses ko-kreasi bersama pemerintah Indonesia untuk mempromosikan inisiatif pemerintah terbuka. Upaya-upaya ini telah menghasilkan capaian nyata, termasuk: Layanan informasi bantuan hukum yang terbuka dan terintegrasi; Sistem informasi pengadaan barang dan jasa, termasuk dalam keadaan darurat; Keterbukaan data pada publikasi pengelolaan keuangan; Mekanisme pengaduan masyarakat terkait pelanggaran dan disinformasi pemilu; Akses terbuka terhadap layanan publik bagi kelompok marjinal; Akses terbuka untuk partisipasi perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, kelompok rentan lainnya, dan masyarakat umum pada umumnya dalam proses perencanaan pembangunan.

Meskipun demikian, tantangan tetap ada dalam pelaksanaan komitmen *Open Government* pemerintah Indonesia. Kemajuan terkait komitmen keterbukaan informasi lingkungan dan sumber daya alam masih lamban. Penduduk lokal dan masyarakat adat seringkali tidak dilibatkan dalam dialog mengenai pemanfaatan sumber daya alam di wilayah mereka. Selain itu, komitmen keterbukaan informasi belanja negara belum sepenuhnya dipenuhi, sehingga sulit untuk menilai kualitas belanja negara. Dalam bidang anti-korupsi, transparansi dana kampanye belum menjadi prioritas.

Lebih lanjut, partisipasi masyarakat sipil yang luas dan bermakna dalam kerangka akuntabilitas sosial kebijakan, masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan ko-kreasi keterbukaan pemerintah Indonesia. Komitmen ini sangat penting untuk menegakkan nilai-nilai pemerintah terbuka, memastikan kelanjutan dari transparansi, partisipasi, akuntabilitas, inklusivitas, dan inovasi. Oleh karena itu, keterbukaan pemerintah harus menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia, tidak hanya untuk keuntungan substansial bagi pemerintah, tetapi juga bagi masyarakat luas.

Pemerintahan terbuka *Open Government* bukan hanya tujuan, tetapi landasan utama tata kelola yang baik. Ini mendorong terciptanya sistem yang menguntungkan pemerintah dan masyarakat luas. Kolaborasi ko-kreasi yang efektif antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil sangat penting untuk mencapai visi bersama tersebut. Itulah mengapa Wahana Visi Indonesia bersama *Indonesia Judicial Research Society* akan mengadakan Diskusi Publik dengan tema ‘Open Government dalam Kebijakan Pemerintah Indonesia’. Prinsip-prinsip Open Government harus masuk dalam aras kebijakan perencanaan pembangunan Indonesia, serta regulasi yang memastikan serta menunjukan komitmen, terutama oleh pemerintah baru yang telah terpilih dalam pemilu 2024.

Diskusi Publik ini merupakan bagian *dari Open Government Week (OG Week)* sebuah agenda tahunan yang menghadirkan serangkaian kegiatan untuk mempromosikan praktik baik keterbukaan pemerintah. Pada tahun 2024, Open Government Partnership (OGP) mengangkat tema “Enabling Open Governent for All” yang akan diselenggarakan pada Senin – Jumat, 27 – 31 Mei 2023.

1. **Tujuan**

Diskusi publik bertujuan:

1. Memperkuat proses ko-kreasi antara pemerintah dan non pemerintah sebagai bagian mekanisme *Open Government.*
2. Advokasi *Open Government* masuk dalam diskursus kebijakan dan tata Kelola pemerintah Indonesia.
3. **Pelaksanaan kegiatan**

Hari/Tanggal:

Waktu:

Tempat: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jl. Taman Suropati No. 2. Jakarta Pusat.

1. **Panelis/Narasumber**

Pembicara kunci: Bogat Widyatmoko, SE, MA (Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan)

Panelis diskusi:

1. Sekretariat Nasional OGI: Maharani Putri S. Wibowo
2. Open Parlemen Indonesia:
3. IJRS:

Moderator: Wahana Visi Indonesia

1. **Peserta**

Peserta kegiatan ini meliputi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah Indonesia; perwakilan Kementrian/Lembaga; akademisi; public umum serta media.

1. **Susunan acara**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **WAKTU** | **KEGIATAN** | **PENGISI** |
|  | Registrasi | Penerima tamu IJRS, WVI & SekNas OGI |
|  | Pembukaan | MC |
|  | Sambutan kunci | Bogat Widyatmoko, SE, MA (Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan) |
|  | Foto bersama | MC |
|  | Diskusi panel | Panelis:1. Sekretariat Nasional OGI: Maharani Putri S. Wibowo
2. Open Parlemen Indonesia:
3. IJRS:

Moderator: Wahana Visi Indonesia |
|  | Tanya jawab/diskusi | Moderator |
|  | Penutupan | MC |
|  |  |  |

1. **Pembiayaan**

Biaya yang timbul dari kegiatan ini merupakan tanggungan dari Sekretariat Nasional Open Government Indonesia - Bappenas.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DESKRIPSI** | **JUMLAH** | **HARGA SATUAN RP** | **TOTAL HARGA RP** |
| Honor transport panelis & pembicara kunci | 4 | 1.000.000,- | 4.000.000,- |
| Honor transportasi MC dan Moderator | 2 | 500.000,- | 1.000.000,- |
| Paket camilan & makan siang | 40 | 150.000,- | 6.000.000,- |
|  |  |  |  |
| Total |  |  | **11.000.000,-** |
|  |  |  |  |

1. **Persetujuan**

Penyusun, Penyusun, Persetujuan,

IJRS WVI SekNas OGI